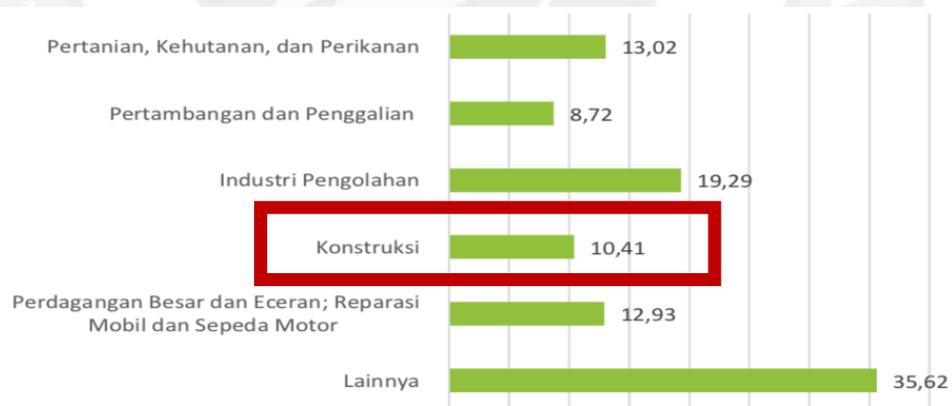


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini, sektor konstruksi menjadi salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan pesat. Pembangunan gedung-gedung bertingkat tinggi, infrastruktur, dan fasilitas umum lainnya menjadi sangat penting dalam mendukung kemajuan ekonomi dari suatu negara. Struktur perekonomian Indonesia ditinjau dari lapangan usaha tidak mengalami perubahan yang signifikan pada periode 2019 - 2022. Data yang bersumber dari BPS, menunjukkan bahwa konstruksi merupakan penyumbang terbesar keempat bagi perekonomian Indonesia dengan kontribusi rata-rata sebesar 10.41% dapat dilihat pada Gambar 1.1



Gambar 1.1 Rata-rata Distribusi PDB Tahun 2019 – 2022 (persen)

Ketika pertumbuhan pada sektor konstruksi setiap tahunnya terus bertambah di Indonesia, hal ini pastinya beriringan dengan pertumbuhan tenaga kerja konstruksi. Berdasarkan data BPS, jumlah tenaga kerja konstruksi di Indonesia sebanyak 8.769.798 tenaga kerja pada tahun 2023. Namun, dibalik pertumbuhan ekonomi dan jumlah tenaga kerja yang banyak, terdapat fakta bahwa sektor ini menjadi

sektor terbesar yang menyumbang angka kecelakaan konstruksi tertinggi dibandingkan dengan sektor lainnya. Dari total kasus kecelakaan kerja yang ada berdasarkan data BPSDM Kementerian PUPR, 2018 penyebab kecelakaan kerja terbesar sebesar 32% berasal dari sektor konstruksi.

Meningkatnya angka kecelakaan kerja di sektor konstruksi disebabkan karena banyaknya pekerjaan berbahaya dan rawan terjadi kecelakaan konstruksi. Risiko yang dihadapi proyek konstruksi akan semakin besar ketika skala proyek konstruksi juga besar. Maka dari itu, aspek yang sangat penting yang perlu diperhatikan dalam setiap proyek konstruksi adalah aspek keselamatan. Ketika aspek keselamatan ini tidak diperhatikan, dapat berakibat fatal dan mengancam keselamatan dan kesehatan para pekerja, serta menimbulkan kerugian finansial yang signifikan. Oleh karena itu untuk meminimalkan kerugian dan menghindari risiko yang mungkin terjadi, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman SMKK dengan tujuan untuk mengantisipasi risiko kecelakaan konstruksi dan mewujudkan lingkungan kerja yang aman.

Penerapan SMKK harus memiliki standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dengan menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan & kesehatan kerja, keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) sendiri merupakan seperangkat kebijakan, prosedur, dan praktik yang ditetapkan untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan mengendalikan bahaya keselamatan

di lokasi proyek konstruksi. SMKK membantu mengintegrasikan aspek keselamatan di setiap tahapan proyek, mulai dari perencanaan hingga penyelesaian, dengan tujuan utama melindungi kehidupan dan kesehatan para pekerja juga pemangku kepentingan lainnya.

Dengan adanya sistem manajemen keselamatan konstruksi juga diharapkan menyebabkan suatu sistem akan lebih fokus pada peningkatan terus menerus dan meminimalisir konflik antar sistem manajemen. Pemerintah telah membuat Komite Keselamatan Konstruksi (K2K) sesuai petunjuk Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 mengenai Jasa Konstruksi yang mana Pemerintah bertanggung jawab kepada penyelenggaraan jasa konstruksi berdasarkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan.

Angka kecelakaan konstruksi di Indonesia terus meningkat dan tergolong cukup tinggi (DJBK, 2020). Berdasarkan catatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) jumlah korban kecelakaan meningkat pada tahun 2019 dari 114.000 jumlah korban kecelakaan meningkat menjadi 177.000 pada tahun 2020 dengan kenaikan sebesar 55,2%. Berikut ini beberapa kecelakaan konstruksi yang pernah terjadi:

- Sepanjang tahun 2017 terjadi kecelakaan konstruksi, antara lain: ambruknya *box girder* pada proyek LRT Jakarta dan lepasnya beton dari *crane*. Kemudian, insiden ambruknya Jembatan Penyebrangan *Overpass* (JPO) di proyek Jalan Tol Bogor - Ciawi – Sukabumi pada Buletin PARAMPARA Edisi 08, Departemen Komunikasi BPSDM Kementerian PUPR.

- 15 Januari 2018: selasar tower II Gedung BEI (Jakarta) yang ambruk yang menyebabkan 72 orang korban luka. Hal ini dikarenakan beban terkumpul sehingga beban momen tidak mampu dipikul oleh tumpuan. Buletin PARAMPARA Edisi 08, Media Komunikasi BPSDM Kementerian PUPR.
- Jatuhnya besi hollow pada pembangunan Rumah Susun Tingkat Tinggi Pasar Rumput dikarenakan kelalaian pekerja tidak ada pengawasan sehingga menelan 1 korban jiwa.
- 4 Januari 2019: robohnya Dinding Penahan Tanah (DPT) dan struktur atas Rumah Pompa Durolis Riau dikarenakan pemadatan tanah dan pengurasan air pompa yang dilakukan bersamaan mengakibatkan bertambahnya gaya tekan pada dinding struktur.
- 06 Agustus 2020: Runtuhnya perancah balok di konstruksi stadion Jakarta Internasional Stadion yang menyebabkan 4 pekerja proyek tersebut terkena semen cor. Hal ini dipicu karena kerusakan sistem perancah sebagai penyangga balok bekisting.
- 03 September 2020: *Sling Lift* barang putus proyek RSI Unisma di Malang yang menewaskan 4 pekerja pada proyek tersebut dan diduga karena kelebihan beban muatan.
- Proyek Strategis Nasional terjadi Kecelakaan Konstruksi pada Pembinaan Sistem SMKK pada website PUPR binakonstruksi.pu.go.id

Berangkat dari kejadian tersebut, diperlukan suatu penerapan sistem manajemen yang terintegrasi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Penerapan sistem manajemen terintegrasi ini harus fokus dan mempunyai komitmen pada

aspek keberlanjutan. Mengembangkan sistem manajemen keselamatan konstruksi terintegrasi yang mampu menghemat sumber daya, secara signifikan menghilangkan redudansi, dan meningkatkan produksi bersih, profitabilitas dan efisiensi organisasi.

Dampak paling signifikan dari manajemen proyek berkelanjutan bagi pelanggan yaitu peningkatan kepuasan dan kualitas hidup. Dampak lainnya adalah peningkatan efisiensi waktu dan biaya, peningkatan kinerja bisnis, dan persiapan untuk penciptaan produk, pasar dan teknologi masa depan. Sehingga, pengintegrasian sistem manajemen kini menjadi instrumen yang lebih efektif untuk mengoptimalkan fungsi serta menjadi panduan sistem manajemen mutu dan kesehatan konstruksi juga keselamatan lingkungan pada pelaksanaan proyek konstruksi.

Yang menjadi permasalahan pertama pada saat ini adalah pada pekerjaan konstruksi sering terjadinya kecelakaan konstruksi sehingga menyebabkan kerugian bagi para pekerja, pemilik properti, publik, kerugian dari sisi lingkungan serta kerugian ekonomi. Saat Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, pemilik proyek serta pelaksana membutuhkan biaya yang harus diperhitungkan, yang selanjutnya menjadi bagian dalam nilai kontrak proyek konstruksi. Perlu dilakukan tindakan pencegahan pada kecelakaan konstruksi karena biaya yang ditimbulkan akibat kecelakaan konstruksi begitu besar. Dengan adanya pencegahan pada kecelakaan konstruksi yang baik dapat mengurangi jumlah biaya yang perlu dikeluarkan atau lebih ekonomis dibandingkan dari dampak yang ditimbulkan. Meskipun penerapan SMKK memiliki landasan hukum

yang kuat, yang disayangkan adalah penerapan SMKK pada proyek-proyek konstruksi secara umum belum terlaksana dengan baik.

Kedua, penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi sudah terintegrasi, namun dalam prakteknya sering di kesampingkan sehingga tidak efektif dalam menjalankan fungsinya. Sehingga diharapkan dari penelitian yang dilakukan ini dapat mendalami penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada proyek bangunan gedung dan juga komponen biaya pada proyek Bangunan Gedung. Kemudian mengetahui faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap biaya penerapan pada Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) di proyek bangunan gedung serta seberapa besar bobot biaya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) terhadap biaya proyek bangunan gedung untuk mewujudkan hasil berkualitas, berkeselamatan, bermanfaat dan berkelanjutan.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah dibuat berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan. Rumusan masalah dikaji terlebih dahulu untuk menjawab latar belakang yang ada. Berikut merupakan rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini:

1. Apa saja yang menjadi faktor-faktor dalam Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021?
2. Apa saja faktor-faktor dominan pada penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi proyek Bangunan Gedung?

3. Bagaimana pengaruh antara penerapan SMKK terhadap biaya penerapan SMKK pada proyek Bangunan Gedung?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berlandaskan dari perumusan masalah yang baru saja diuraikan, penelitian ini memiliki tujuan, sebagai berikut:

1. Menganalisis apa saja yang menjadi faktor-faktor dalam Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor dominan pada penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi proyek Bangunan Gedung.
3. Mengetahui pengaruh antara penerapan SMKK terhadap biaya penerapan SMKK pada proyek Bangunan Gedung.

1.4. Batasan Penelitian

Untuk sampai pada bentuk permasalahan yang dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka pada penelitian ini akan diberikan batasan masalah agar penelitian tidak memperluas cakupan materi yang diteliti dan menjadi lebih terfokus. Batasan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Penelitian ini difokuskan pada penerapan SMKK pada proyek Bangunan Gedung berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.
2. Penelitian yang dibahas mengenai 9 (sembilan) komponen biaya SMKK.

3. Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan keselamatan konstruksi dan peraturan yang berlaku di wilayah penelitian.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi Institusi

Manfaat penelitian ini bagi institusi untuk menambah pengetahuan sehingga menambah pengetahuan untuk memperluas ilmu keselamatan konstruksi dalam proyek, khususnya mengenai penerapan komponen biaya sistem manajemen keselamatan gedung dan menggali faktor-faktor yang berpengaruh terhadap biaya pada penerapan SMKK proyek bangunan gedung.

1.5.2 Bagi Penulis

Manfaat pada penelitian ini untuk peneliti adalah sebagai bentuk pengaplikasian ilmu yang diperoleh dan memberikan informasi serta wawasan baru mengenai faktor biaya SMKK yang ditetapkan oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

1.5.3 Bagi Konstruksi

Manfaat penelitian ini pada konstruksi adalah mendorong kesadaran akan pentingnya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dalam proyek konstruksi juga memberikan rekomendasi yang digunakan oleh pekerja konstruksi untuk meningkatkan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.